

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ternak Sapi

Salah satu komoditas pertanian yang masih diimpor oleh Indonesia saat ini adalah daging sapi. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan akan daging sapi sementara pasokannya tidak mencukupi. Dampaknya adalah harga daging sapi yang tinggi dan Indonesia harus mengimpor dari negara lain. Karena permintaan dan harga daging sapi sangat tinggi, bisnis ternak sapi potong menjadi peluang yang menarik. Oleh karena itu, bisnis ternak sapi sedang berkembang pesat di Indonesia (Irfan dan Rizki, 2018).

Sapi merupakan ternak peliharaan yang mayoritas kehidupannya diatur dan diawasi oleh manusia, dengan tujuan utamanya adalah untuk kepentingan manusia. Manfaat sapi bagi manusia mencakup aspek ekonomi, pemenuhan gizi, dan nilai-nilai sosial budaya (Mustofa, 2020). Usaha sapi potong memiliki potensi untuk menjadi usaha yang menguntungkan. Sapi potong merupakan salah satu komoditas ternak penghasil daging terbesar dari kelompok ternak ruminansia dalam produksi daging nasional (Asnawi, 2014). Sapi potong memiliki peran signifikan dalam agribisnis pedesaan, terutama dalam integrasi dengan sub sektor pertanian lainnya sebagai bagian dari rantai biologis dan ekonomis sistem usaha tani. Dalam konteks penyediaan pupuk, sapi juga dapat berfungsi sebagai "pabrik kompos". Satu ekor sapi dapat menghasilkan kotoran sekitar 8-10 kg/hari yang dapat diolah menjadi 4-5 kg pupuk organik. Potensi pupuk organik ini diharapkan dapat dioptimalkan untuk mempertahankan kesuburan lahan melalui siklus unsur hara yang sempurna (Mariyono *et al.*, 2010).

Sapi potong di Indonesia merupakan salah satu varietas ternak yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan daging, setelah ayam (Ramla, 2021). Kontribusi sapi potong sebagai penyedia daging terbesar dari jenis ternak ruminansia di tingkat nasional menunjukkan potensi pengembangan usaha ternak sapi potong sebagai sumber pendapatan yang menguntungkan (Sandi dan Purnama, 2017). Sapi potong diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan

pendapatan petani serta berperan dalam pertumbuhan ekonomi di pedesaan (Supanggih dan Widodo, 2013). Menurut Budiraharjo *et al.*, (2011) dan (Mulyono *et al.*, 2012), Selain menghasilkan keuntungan, tujuan beternak sapi potong juga meliputi penggunaannya sebagai simpanan dana untuk keperluan mendesak dan memanfaatkan pupuk dari kotoran ternak sebagai sumber nutrisi dalam usaha pertanian.

2.2 Kelompok Tani

Kelompok tani adalah salah satu program pemerintah untuk menerapkan pertanian berkelanjutan. Secara tidak langsung, kelompok tani dapat meningkatkan produktivitas dengan mengelola usaha tani bersama. Selain itu, kelompok tani berfungsi sebagai media belajar organisasi dan kerja sama antar petani . (Hafizin *et al.*, 2021). Kelompok tani memiliki peran yang melekat terhadap anggota yang tergabung di dalamnya. Salah satu peran kelompok tani adalah sebagai kelas belajar, termasuk dalam proses adopsi teknologi pertanian. Teknologi dalam usahatani digunakan untuk meningkatkan efisiensi (Wati *et al.*, 2020)

Kelompok tani dibentuk sesuai kebutuhan dari masyarakat yang memiliki tujuan yang sama dan ingin bekerja sama satu dengan yang lain (Harijati, 2007). Kelompok tani pada dasarnya adalah kelompok non formal di pedesaan yang tumbuh dikembangkan dari, oleh dan untuk petani (Mutmainna *et.al.*, 2016). Kelompok tani merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani. Keberhasilan kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani anggota kelompok dalam banyak hal ditentukan oleh sampai sejauh mana kelompok tersebut dapat melaksanakan peranannya (Prasetia *et.al.*, 2015).

2.3 Program Bantuan Ternak Sapi

Program bantuan tentu akan memberikan keuntungan tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi sosial. Salah satu keuntungan sosialnya adalah terciptanya hubungan sosial yang harmonis antara peternak yang menerima program dengan pihak dinas, dan sebaliknya. Di sisi lain, dari segi ekonomi, program tersebut dapat meningkatkan pendapatan para peternak (Asshidiqi *et al.*,

2016). Bantuan sapi kepada peternak melalui berbagai program diharapkan dapat berdampak positif, yaitu meningkatkan pertumbuhan populasi sapi dan juga pendapatan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menguatkan perekonomian lokal dan memenuhi kebutuhan keluarga dengan lebih baik (Yanti et al., 2023)

Berdasarkan tujuan pemerintah dalam pelaksanaan program bantuan ternak sapi, tidak hanya bertujuan untuk mengurangi impor daging sapi, tetapi juga untuk mendorong masyarakat agar meningkatkan swasembada daging sapi. Program bantuan tersebut juga bertujuan untuk memberdayakan petani di seluruh wilayah Kabupaten (Rochama, 2020). Program bantuan ternak sapi kepada peternak atau kelompok ternak dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan akan ternak atau daging sapi, serta untuk meningkatkan kesejahteraan para peternak sapi (Yuzaria dan Iskandar, 2018). Program merupakan metode yang telah disetujui untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pengertian ini, program-program merujuk pada langkah-langkah konkret yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, program pemerintah mencakup upaya-upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Juni dan Rezani, 2021).

2.4 Program Dana Aspirasi DPR

Fahamsyah, (2022) Sejatinya, dana aspirasi itu adalah Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) bertujuan untuk melakukan sinkronisasi program pembangunan berbasis daerah pemilihan dan di desain tanpa dasar hukum dan argumentasi. Gagasan UP2DP untuk mengimplementasikan pasal yang menyebutkan bahwa anggota parlemen berhak mengusulkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat pilihannya sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disusun secara sistematis, yang meliputi rencana penerimaan dan rencana pengeluaran untuk satu tahun anggaran, yang disusun oleh pemerintah pusat dan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kenamon (2016) dan Sri *et.al*, (2018) mengatakan bahwa APBN merupakan instrumen yang mengatur

mengenai pengeluaran dan pendapatan negara dengan tujuan membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa APBN memiliki peranan penting dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan nasional baik itu bidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan, sarana dan prasarana.

Dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 (Pengganti Undang- Undang Nomor. 27 Tahun 2009), disepakati rumusan yang menegaskan adanya dana aspirasi DPR yang tertuang dalam Pasal 80 huruf j menyebutkan bahwa anggota DPR berhak mengusulkan dan juga memperjuangkan pembangunan daerah pemilihan program. Atas dasar itu, Peraturan DPR Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Dalam peraturan ini, dana hibah dapat diusulkan oleh masing-masing anggota DPR atau diusulkan bersama untuk diintegrasikan ke dalam program pembangunan Nasional dalam APBN (Rustianti *et.al.*, 2023). APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, dan pembiayaan adalah merupakan instrumen utama kebijakan fiskal untuk mengarahkan perekonomian nasional dan menstimulus pertumbuhan ekonomi sehingga besarnya penyerapan akan berdampak pada semakin besarnya daya dorong terhadap pertumbuhan dan sebaliknya (Widodo dan Dahiri, 2016). APBN merupakan kekayaan negara yang dikelola langsung dan termasuk dalam pengurusan umum/administratif. Fungsi anggaran antara lain: kebijakan yang telah disahkan dan digunakan dapat dikontrol masyarakat mengenai apakah hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak dan anggaran dapat digunakan atau dijadikan bahan utama dalam pengelolaan kekayaan negara. (Halim dan Kusufi 2014)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan melalui peraturan daerah. APBD berfungsi sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai prioritas pengalokasian dana setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD. APBD menjadi acuan untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan efisiensi yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan otonomi daerah. Anggaran memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan pengendalian di lingkungan pemerintahan (Sianturi, 2024)

2.5 Evaluasi Program Bantuan Ternak Sapi

Evaluasi program adalah penilaian terhadap program sebelum pelaksanaannya, dengan tujuan memeriksa secara menyeluruh perencanaan dan pelaksanaan program. Evaluasi ini mencakup peninjauan terhadap berbagai aspek program seperti pengumpulan data, analisis situasi, identifikasi masalah, penetapan tujuan, serta strategi pencapaian tujuan. Hal ini juga melibatkan evaluasi terhadap semua elemen program, termasuk rencana kegiatan, metode yang akan digunakan, target kegiatan, volume kegiatan, lokasi dan waktu pelaksanaan, serta alokasi dana yang dibutuhkan (Fajar *et al.*, 2023).

Evaluasi adalah proses penilaian terhadap kebijakan untuk menilai sejauh mana tujuan, sasaran, dan program telah tercapai dengan tepat (Surya, 2012). Evaluasi memiliki peranan penting dalam menganalisis kebijakan. Salah satu fungsinya adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang efektivitas kebijakan, yaitu sejauh mana kebijakan tersebut telah berhasil mencapai tujuan, nilai, dan peluang yang diinginkan melalui langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah (Pratomo, 2016). Evaluasi merupakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan. Evaluasi ini digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di masa depan agar dapat lebih baik.

Menurut (Zhang *et.al.*, 2011) Model evaluasi *Context, Input, Process, and Product* (CIPP) adalah suatu kerangka yang luas digunakan untuk melakukan evaluasi baik secara formatif maupun sumatif terhadap proyek, personil, produk, organisasi, atau sistem. Ini adalah pendekatan yang komprehensif yang memungkinkan penilaian yang menyeluruh terhadap berbagai aspek dari suatu entitas. Model evaluasi ini adalah yang paling terkenal dan diakui oleh para evaluator. CIPP singkatan dari empat tahap evaluasi utama: *Context Evaluation* (evaluasi terhadap konteks), *Input Evaluation* (evaluasi terhadap masukan), *Process Evaluation* (evaluasi terhadap proses), dan *Product Evaluation* (evaluasi terhadap

hasil). Model CIPP mengadopsi pandangan bahwa program yang dinilai adalah sebuah sistem, sehingga evaluasi harus mencakup analisis terhadap berbagai komponen program tersebut. Inti dari evaluasi model CIPP adalah mengevaluasi konteks, masukan, proses, dan hasil dari program (Djuanda, 2020).

Adapun penilaian dalam model evaluasi CIPP (Jenawi, 2016) yaitu:

- a. **Evaluasi Context** adalah usaha untuk menguraikan dan menjelaskan lingkungan, kebutuhan, dan tujuan dari suatu program. Dalam evaluasi konteks peneliti menggunakan tingkat efektifitas program pada komponen konteks yang meliputi lingkungan program, tujuan program, dan sasaran program.
- b. **Evaluasi Input** mencakup pertimbangan terhadap sumber daya dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan umum dan tujuan khusus program. Dalam evaluasi input peneliti menggunakan tingkat efektivitas program pada komponen input yang meliputi, motivasi anggota, pemanfaatan sarana dan prasarana, instruktur, kesepakatan bagi hasil, partisipasi para anggota kelompok ternak.
- c. **Evaluasi Proses** melibatkan pengumpulan data evaluasi yang telah direncanakan dan diimplementasikan dalam praktik. Dalam evaluasi proses, peneliti menggunakan tingkat efektifitas program pada komponen proses meliputi, pelaksanaan program, partisipasi para peternak, persiapan bahan, persiapan lahan dan biaya, penggunaan metode, kesesuaian kebutuhan, prekrutan anggota.
- d. **Evaluasi Produk atau Hasil** dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan..